



RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS
2025 - 2029

DINAS PERIKANAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

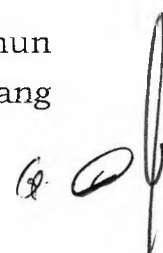
BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029, maka terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang telah disusun perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati:

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang



- Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 1 Seri E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 Nomor 1 Seri C);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 Nomor 1 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung;
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, dengan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK):
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Iskak Kabupaten Tulungagung;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat dr. Karneni Kabupaten Tulungagung;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung;



4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung;
5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung;
7. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung;
8. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Tulungagung;
9. Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung;
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung;
11. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung;
12. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung;
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung;
17. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung;
19. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung;
20. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung;
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung;
22. Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung;
23. Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung;
24. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung;
25. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung;
26. Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung;
27. Sekretariat DPRD Kabupaten Tulungagung;
28. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung;
29. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung;
30. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung

A handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature is a long, vertical stroke with a small loop at the top, and the initials are a stylized 'Q' followed by a horizontal line.

31. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulungagung;
32. Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tulungagung;
33. Inspektorat Daerah Kabupaten Tulungagung;
34. Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung;
35. Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung;
36. Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung;
37. Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung;
38. Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung;
39. Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung;
40. Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung;
41. Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung;
42. Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung;
43. Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung;
44. Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung;
45. Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung;
46. Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung;
47. Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung;
48. Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung;
49. Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung;
50. Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung;
51. Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung;
52. Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung;
53. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulungagung.

Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 19 September 2025
BUPATI TULUNGAGUNG,



GATUT SUNU WIBOWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 19 September 2025
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. TRI HARIADI, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19700906 199101 1 001

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 Nomor 43

Q

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR : 43 TAHUN 2025
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029. Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif dengan demikian selanjutnya, kedudukan Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD yang merupakan dokumen perencanaan induk dengan jangka waktu lima tahun.

Renstra memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah sesuai dengan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004, Undang – undang nomor 23 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008.

Akhir kata semoga Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025–2029 yang telah disahkan dan ditetapkan ini dapat digunakan sebagai acuan setiap unit kerja lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung sebagai perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan selama 5 (Lima) tahun serta dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan di sektor perikanan agar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Tulungagung, pelaku usaha dan seluruh stakeholders yang berkepentingan guna mendukung terwujudnya *good governance*.

Tulungagung, ²² September 2025

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

LUGU TRI HANDOKO, SE, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660724 198603 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum... ..	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU	
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung	10
2.2 Sumberdaya Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung	16
2.2.1 Sumber daya Manusia pada Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung	16
2.2.2 Sumber Daya Aset Tetap	17
2.3 Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung	19
2.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan Berdasarkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2020-2024.....	19
2.3.2 Capaian Kinerja Keuangan 2020-2024	21
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	23
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung.....	24
2.6 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan	25
2.7 Isu Strategis.....	25

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	30
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 - 2029	30
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan	33

BAB IV PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	36
4.1 Program dan Kegiatan 2025 - 2029	36

BAB V PENUTUP	54
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1.a	Klasifikasi ASN berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	16
Tabel 2.2.1.b	Klasifikasi ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan	16
Tabel 2.2.2	Sumber Daya Aset Tetap Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung	17
Tabel 2.3.1	Pencapaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung 2020 – 2024	20
Tabel 2.3.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung 2020 – 2024.....	18
Tabel 2.6	Pemetaan Permasalahan Pembangunan.....	26
Tabel 2.7	Isu Permasalahan Perangkat Daerah	27
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran, dan jangka Menengah Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung	31
Tabel 3.2	Penahapan Pembangunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung.....	34
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung	35
Tabel 4.1	Teknik merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD	37
Tabel 4.2	Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026.....	41
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	51
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung	52
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK) PD.....	53

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Perikanan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan sumberdaya perikanan secara efisien, efektif, berdaya saing dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulungagung.

Kabupaten Tulungagung mempunyai potensi sumberdaya perikanan berupa perairan laut, payau, perairan umum dan budidaya ikan air tawar. Kegiatan usaha perikanan dalam memanfaatkan potensi tersebut meliputi cabang-cabang usaha penangkapan ikan di laut dan perairan umum, budidaya udang di tambak dan budidaya ikan konsumsi maupun ikan hias air tawar di kolam pasangan, kolam tanah yang berupa pekarangan, tegalan dan sawah.

Dengan demikian upaya untuk mengoptimalkan sumber daya perikanan perlu direncanakan dengan baik agar dapat tetap menjaga keberlangsungan sumber daya alamnya. Hal ini dilakukan dengan menyusun dokumen perencanaan yang disebut Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif dengan demikian selanjutnya, kedudukan Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD yang merupakan dokumen perencanaan induk dengan jangka waktu lima tahun.

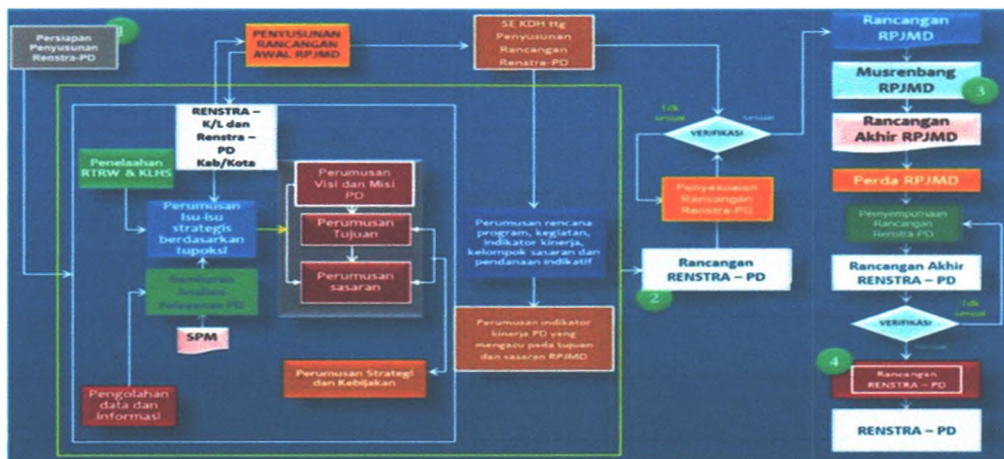
Renstra memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 - 2029 disusun dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung sebagai dokumen perencanaan tahunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Fungsi Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung secara khusus meliputi beberapa hal ini dibawah ini yaitu:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang perikanan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra melalui tiga tahapan penting yaitu Pertama penyusunan dokumen rancangan renstra yang mengacu pada visi misi Kepala Daerah terpilih sebagai draft awal untuk bahan dasar yang nantinya akan dikembangkan lebih lanjut. Kedua penyusunan rancangan akhir dengan melibatkan berbagai stakeholders dari unsur pemerintah, masyarakat dan swasta dalam memberikan kontribusi terhadap renstra. Ketiga penetapan renstra sebagai dokumen resmi melalui peraturan Kepala Daerah.



Gambar 1. Alur penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung disusun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban dengan tetap memperhatikan berbagai kebijakan dan program prioritas Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Sehingga dapat tercipta sinergitas dan keselarasan program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar Perangkat Daerah.

Keterkaitan Renstra ini dengan RPJMD dalam rangka menjamin sinergitas pembangunan dalam rangka mengoptimalkan capaian target kinerja pembangunan di sektor perikanan di Kabupaten Tulungagung yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung terkait dengan pencapaian misi pertama RPJMD Pemerintah Kabupaten Tulungagung yaitu Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Berbasis Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah dan Membangun dari Desa dengan tujuan meningkatnya daya saing perekonomian daerah yang mendukung sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya stabilitas dan nilai tambah perekonomian daerah dengan indikator sasaran PDRB per-Kapita.

Selain itu juga Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung mengacu pada arah kebijakan Nasional pembangunan kelautan dan perikanan yang ditetapkan, dengan demikian diharapkan terjadi sinkronisasi antar dokumen perencanaan dan pelaksanaannya. Kemudian dokumen Renstra ini dilengkapi dengan indikator kinerja beserta pendanaanya sehingga akuntabilitas pelaksanaan beserta pengorganisasinya dapat dievaluasi selama periode 2025 - 2029.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6402); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun

- 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 927 Tahun 2011);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun

- 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 19 Seri E);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 7 Seri E);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 Nomor 1 Seri C);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029;
 24. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 53);
 25. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan Dinas

Perikanan Kabupaten Tulungagung, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung;

2. Sebagai pedoman bagi Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung yang memuat program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026, terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang gambaran umum penyusunan Renstra terdiri dari Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan dan menyajikan Gambaran Umum Perangkat Daerah selama beberapa tahun terakhir, yang meliputi Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah; Sumber Daya Perangkat Daerah; Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Kelompok sasaran layanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini menyajikan permasalahan pembangunan sesuai sektor dan isu strategis yang memperhatikan isu/kebijakan internasional, regional, nasional, daerah sekitar dan kebijakan Jawa Timur, yang meliputi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah; Telaah Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi penyajian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah serta cascading kinerja mulai dari tujuan sampai dengan sub output.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 2 (dua) tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Pada bab ini disajikan rencana program/kegiatan/sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

Bab ini berisi penutup Renstra Perangkat Daerah

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten

Dinas Perikanan sebagai pelaksana pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Tulungagung memiliki tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung. Dalam peraturan ini Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perikanan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Adapun fungsi yang diselenggarakan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung, meliputi:

- a. Perumusan kebijakan bidang perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang perikanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung dilengkapi dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1.Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - 2.Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional:

- d. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan membawahi kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. KEPALA DINAS

Mempunyai tugas pokok diantaranya: memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan serta merumuskan kebijakan teknis di bidang Perikanan, dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan program jangka pendek, menengah dan jangka panjang bidang perikanan;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan;
- c. Pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang perikanan;
- d. Pemberian rekomendasi perijinan usaha perikanan;
- e. Pelaksanaan administrasi;
- f. Pembinaan profesional tenaga perikanan;
- g. Pembinaan UPTD dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

A. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan.

Untuk melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengelolaan dan pembinaan urusan tata usaha dan tata kearsipan; rumah tangga dan keprotokolan Dinas;
- b. Penyusunan program dan pelaporan, pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan Dinas;
- c. Pengkoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang perikanan;
- d. Pelaksanaan, pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. BIDANG PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan, evaluasi dan mengkoordinasikan kegiatan bidang pengelolaan perikanan budidaya. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- b. Pelaksanaan pembinaan, peningkatan produksi budidaya ikan;
- c. Pelaksanaan pemberdayaan pembudidaya ikan;
- d. Pengkoordinasian penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
- e. Pelaksanaan pengelolaan perikanan budidaya di kawasan budidaya;
- f. Pelaksanaan pendataan statistik di bidang perikanan budidaya;
- g. Pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan;
- h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya.

C. BIDANG PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan, evaluasi dan mengkoordinasikan kegiatan bidang pengelolaan perikanan budidaya. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan produksi perikanan tangkap;
- c. Pengkoordinasian penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- d. Pelaksanaan pendataan statistik di bidang perikanan tangkap;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan nelayan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan Sumberdaya Ikan baik di Perairan Umum Daratan dan atau perairan pantai;
- g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap.

D. BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan evaluasi dan mengkoordinasikan kegiatan dibidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- b. Pelaksanaan pembinaan mutu dan peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- c. Pelaksanaan Pemberdayaan Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan;
- d. Pengoordinasian penyediaan prasarana dan sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

- e. Pelaksanaan pendataan statistik di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

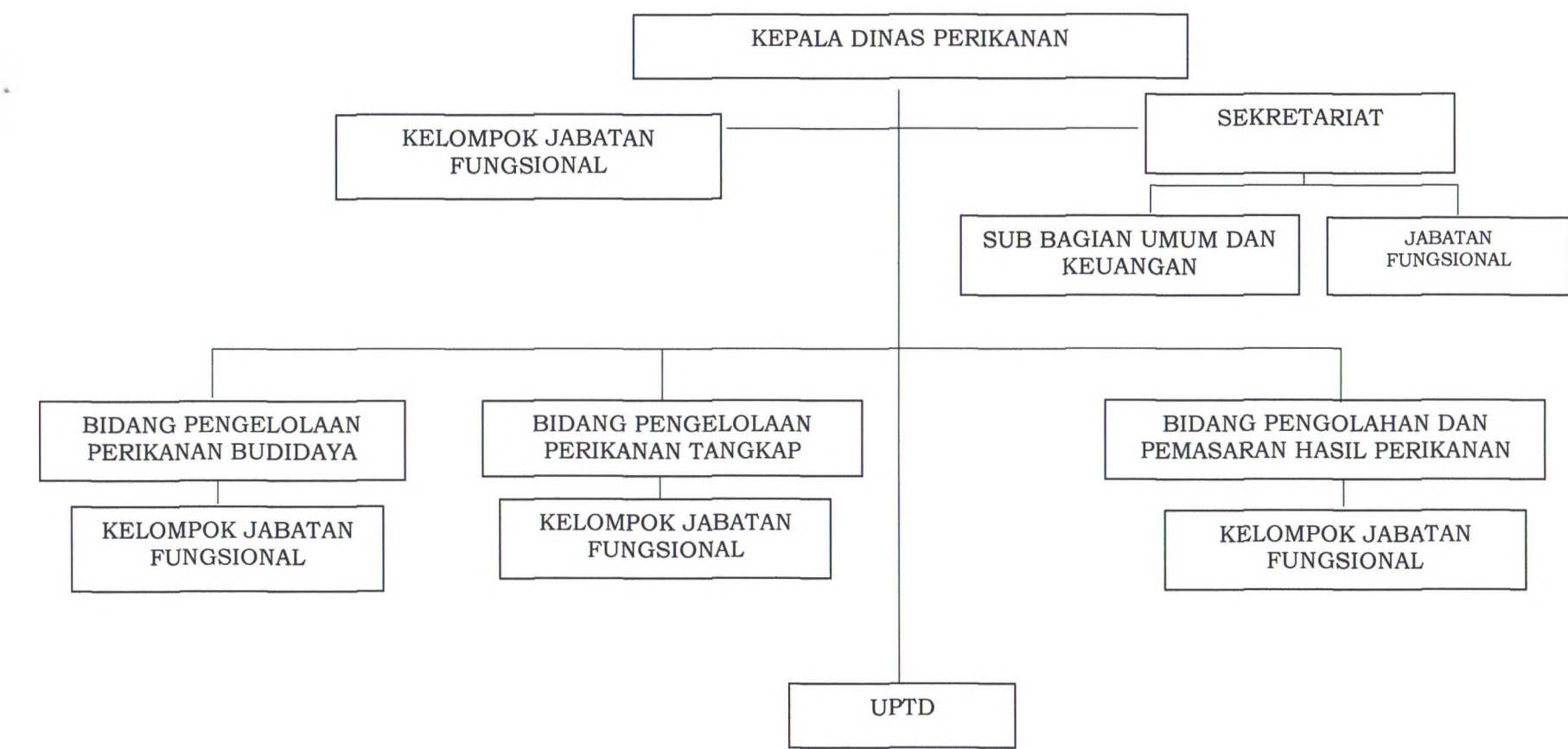
E. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- (2) Pembentukan dan susunan organisasi UPTD diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

F. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing – masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung.



2.2. Sumber Daya Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung

2.2.1. Sumber Daya Manusia Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung

Dalam rangka peningkatan kinerja dan pelaksanaan pembangunan perikanan perlu dukungan ketersediaan SDM yang memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas. SDM yang ada pada Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung sampai dengan per 1 Juli 2025 sebanyak 40 ASN. Klasifikasi ASN berdasarkan pangkat dan golongan disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 2.2.1.a Klasifikasi ASN Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Pangkat	Golongan	Jumlah ASN Laki-laki (orang)	Jumlah ASN Perempuan (orang)
Pembina	IV	2	2
Penata	III	8	12
Pengatur	II	5	2
PPPK		3	6
Jumlah		18	22

ASN pada Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung juga bisa diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah. Berdasarkan kriteria ini, lulusan sarjana (S1) mendominasi dengan jumlah relatif 59,38% dari keseluruhan ASN. Klasifikasi ASN berdasarkan tingkat pendidikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2.1.b Klasifikasi ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah ASN (orang)
Magister (S 2)	9
Sarjana (S 1)	21
Diploma	5
SLTA	4
SLTP	1
SD	0
Jumlah	40

2.2.2. Sumber Daya Aset Tetap

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung juga ditunjang dengan prasarana berupa aset tetap sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2.2. Sumber Daya Aset Tetap Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung

Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah	Jumlah Harga	Ket.
1	2	3	4	5
1.3.1.01.01.04.	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	5	2.341.084.000,00	
1.3.2.01.01.07.011.	Truck & Bush Tyre	1	75.900.000,00	Kontainer
1.3.2.01.01.11.	MESIN PROSES	20	1.670.722.774,52	
1.3.2.01.02.04.	KAPAL TARIK		188.500.000,00	
1.3.2.01.03.04.	ELECTRIC GENERATING SET	6	252.988.300,00	
1.3.2.01.03.05.	POMPA	4	8.690.000,00	
1.3.2.01.03.07.	UNIT PEMELIHARAAN LAPANGAN	2	17.970.000,00	
1.3.2.02.01.01.	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	2	550.755.000,00	
1.3.2.02.01.02.	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	2	638.860.000,00	
1.3.2.02.01.03.	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	3	757.359.020,00	
1.3.2.02.01.04.	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	44	685.144.000,00	
1.3.2.02.01.05.	KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA	3	44.477.000,00	
1.3.2.02.02.	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2	5.555.000,00	
1.3.2.03.	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		106.585.600,00	
1.3.2.03.01.	ALAT BENGKEL BERMESIN	4	14.800.000,00	
1.3.2.03.03.	ALAT UKUR		91.785.600,00	
1.3.2.03.03.01.	ALAT UKUR UNIVERSAL	6	17.076.600,00	
1.3.2.03.03.10.	ALAT TIMBANGAN/BIARA	14	69.209.000,00	
1.3.2.03.03.11.	ANAK TIMBANGAN/BIARA	1	5.500.000,00	
1.3.2.04.01.	ALAT PENGOLAHAN		1.522.187.006,00	
1.3.2.04.01.01.	ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN		16.000.000,00	
1.3.2.04.01.02.	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK	7	28.615.000,00	
1.3.2.04.01.03.	ALAT PANEN	2	10.000.000,00	
1.3.2.04.01.04.	Palat Penyimpan Hasil Percobaan Ertanian	18	535.380.400,00	
1.3.2.04.01.05.	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	12	298.846.600,00	
1.3.2.04.01.06.	ALAT PROSESING	3	21.000.000,00	
1.3.2.04.01.07.	ALAT PASCA PANEN	3	333.561.195,00	
1.3.2.04.01.08.	ALAT PRODUKSI PERIKANAN	88	278.783.811,00	
1.3.2.05.	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA		1.642.445.274,00	
1.3.2.05.01.	ALAT KANTOR		342.938.250,00	
1.3.2.05.01.02.007.	Mesin Penghitung Uang	1	12.960.000,00	Mixer/Ble nder

1.3.2.05.01.04.	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	47	208.005.450,00	
1.3.2.05.01.05.	ALAT KANTOR LAINNYA	21	121.972.800,00	
1.3.2.05.02.	ALAT RUMAH TANGGA		1.245.706.024,00	
1.3.2.05.02.01.	MEUBELAIR	94	385.442.000,00	
1.3.2.05.02.03.	ALAT PEMBERSIH	2	6.750.000,00	
1.3.2.05.02.04.	ALAT PENDINGIN	30	237.813.200,00	
1.3.2.05.02.05.	ALAT DAPUR	4	7.940.000,00	
1.3.2.05.02.06.	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	60	591.430.200,00	
1.3.2.05.02.07.	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	10	16.330.624,00	
1.3.2.05.03.	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT		53.801.000,00	
1.3.2.05.03.01.	MEJA KERJA PEJABAT	5	20.559.000,00	
1.3.2.05.03.02.	MEJA RAPAT PEJABAT	3	12.650.000,00	
1.3.2.05.03.03.	KURSI KERJA PEJABAT	5	19.092.000,00	
1.3.2.05.03.07.	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	1	1.500.000,00	
1.3.2.06.	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	1	167.965.000,00	
1.3.2.06.01.	ALAT STUDIO		92.330.000,00	
1.3.2.06.01.01.	PERALATAN STUDIO AUDIO	3	46.150.000,00	
1.3.2.06.01.02.	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	6	46.180.000,00	
1.3.2.06.02.01.	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	13	43.735.000,00	
1.3.2.06.02.02.	ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB	1	31.900.000,00	
1.3.2.08.01.	UNIT ALAT LABORATORIUM	1	172.842.100,00	
1.3.2.08.01.01.	ALAT LABORATORIUM KIMIA AIR TEKNIK PENYEHATAN	9	64.142.100,00	
1.3.2.08.01.46.	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN PERAIRAN	2	108.700.000,00	
1.3.2.10.01.02.	PERSONAL KOMPUTER	46	594.423.840,00	
1.3.2.10.02.02.	PERALATAN MINI KOMPUTER	4	36.550.000,00	
1.3.2.10.02.03.	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	17	106.114.750,00	
1.3.2.10.02.04.	PERALATAN JARINGAN	2	37.750.000,00	
1.3.2.10.02.05.	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	3	4.097.000,00	

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung

Keberhasilan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung dapat dilihat dari pencapaian kinerja pelayanan dan anggaran.

Indikator kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung dalam kurun waktu tahun 2020-2024 mengacu pada sasaran strategis *Meningkatnya Produksi Sektor Usaha Perikanan*.

Keberhasilan pembangunan perikanan yang dilaksanakan dapat dilihat dari Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung.

Sedangkan kinerja anggaran dan realisasi pendanaanya sebagai pendukung utama keberhasilan pembangunan disektor perikanan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Rata-Rata Persentase Peningkatan Produksi Usaha Sektor Perikanan	-	-	√	5,00	5,00	5,00	5,00	13,92	(33,60)	26,82	19,42	(8,86)	22,297	-6,72	5,36	3,88	-1,77	1,60
2.	Rata-Rata Persentase Peningkatan Produksi Usaha Perikanan Tangkap	-	-	√	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00	(45,19)	38,70	19,69	(40,87)	52,263	-9,04	7,74	3,94	-8,17	8,71
3.	Rata-Rata Persentase Peningkatan Produksi Usaha Perikanan Budidaya	-	-	√	5,00	5,00	5,00	5,00	8,50	(47,43)	25,11	32,82	8,36	8,61	-9,49	5,02	6,56	1,67	1,01
4.	Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	-	-	√	5,00	5,00	5,00	5,00	27,25	(38,72)	119,69	72,69	27,20	6,02	-7,74	23,94	14,54	5,44	0,22
5.	Nilai SAKIP Perangkat daerah	-	-	√										84.05					
6.	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-	-	√										-1,95					
7.	Produksi Perikanan Tangkap		√		100	100	100	100	100	109,90	149,53	175,55	101,82	81,67	1,10	1,50	1,76	1,02	0,82
8.	Produksi Perikanan Budidaya		√		100	100	100	100	100	85,79	101,59	114,38	114,45	117,12	0,86	1,02	1,14	1,14	1,06

2.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan Berdasarkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2020-2024

Kebijakan pembangunan di sektor perikanan dalam kurun waktu 2020-2024 yang tertuang dalam Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023 dan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2024-2026 dengan indikator kinerja yang telah direvisi melalui dokumen Pohon Kinerja telah menghasilkan capaian pembangunan perikanan yang cukup berarti berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

a. Rata-Rata Persentase Peningkatan Produksi Usaha Sektor Perikanan

Rata-Rata Capaian pada indikator Rata-Rata Persentase Peningkatan Produksi Usaha Sektor Perikanan Capaian kinerja pelayanan pada tahun kurun waktu 2020 sampai dengan tahun 2024 pada indikator sebesar 47,14% capaian tergolong sangat rendah karena pada tahun 2020 tersebut ada bencana nasional yaitu COVID-19 sehingga membatasi aktivitas ekonomi di sektor perikanan, kemudian ditahun 2024 terjadi penurunan produksi yang sangat drastis disektor tangkap yang penurunnya mencapai 40, 87% karena adanya fenomena alam EL-NINO yang menyebabkan pemanasan air laut sehingga ikan di wilayah perairan di Kabupaten Tulungagung diindikasikan bermigrasi ke tempat lain. Namun demikian seiring perbaikan kondisi dan upaya baik secara iklim yang mendukung dan upaya OPD melalui program prioritas yang aktivitas kegiatannya fokus pada pemberdayaan serta bantuan sarpras produksi kepada masyarakat perikanan pada tahun 2024 Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung dapat mencapai kinerjanya yang dapat dikatakan sangat baik yaitu 160,22%.

b. Rata-rata Peningkatan Produksi Sektor Usaha Perikanan Tangkap

Jika dilihat dari tabel pencapaian kinerja pelayanan berdasarkan indicator kinerja utama (IKU) untuk Rata-rata Peningkatan Produksi Sektor Usaha Perikanan Tangkap dalam

2.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan Berdasarkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2020-2024

Kebijakan pembangunan di sektor perikanan dalam kurun waktu 2020-2024 yang tertuang dalam Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023 dan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2024-2026 dengan indikator kinerja yang telah direvisi melalui dokumen Pohon Kinerja telah menghasilkan capaian pembangunan perikanan yang cukup berarti berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

a. Rata-Rata Persentase Peningkatan Produksi Usaha Sektor Perikanan

Rata-Rata Capaian pada indikator Rata-Rata Persentase Peningkatan Produksi Usaha Sektor Perikanan Capaian kinerja pelayanan pada tahun kurun waktu 2020 sampai dengan tahun 2024 pada indikator sebesar 47,14% capaian tergolong sangat rendah karena pada tahun 2020 tersebut ada bencana nasional yaitu COVID-19 sehingga membatasi aktivitas ekonomi di sektor perikanan, kemudian ditahun 2024 terjadi penurunan produksi yang sangat drastis disektor tangkap yang penurunnya mencapai 40, 87% karena adanya fenomena alam EL-NINO yang menyebabkan pemanasan air laut sehingga ikan di wilayah perairan di Kabupaten Tulungagung diindikasikan bermigrasi ke tempat lain. Namun demikian seiring perbaikan kondisi dan upaya baik secara iklim yang mendukung dan upaya OPD melalui program prioritas yang aktivitas kegiatannya fokus pada pemberdayaan serta bantuan sarpras produksi kepada masyarakat perikanan pada tahun 2024 Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung dapat mencapai kinerjanya yang dapat dikatakan sangat baik yaitu 160,22%.

b. Rata-rata Peningkatan Produksi Sektor Usaha Perikanan Tangkap

Jika dilihat dari tabel pencapaian kinerja pelayanan berdasarkan indicator kinerja utama (IKU) untuk Rata-rata

Peningkatan Produksi Sektor Usaha Perikanan Tangkap dalam kurun waktu tahun 2020-2024 capaian kinerjanya sebesar 63,55% hal ini disebabkan oleh beberapa kondisi yaitu adanya bencana Nasional COVID-19 pada tahun 2020 dan adanya gejala alam EL-NINO pada tahun 2023, namun demikian pada tahun 2024 capaian kinerja Rata-Rata Persentase Peningkatan Usaha Perikanan Tangkap dapat dikatakan sangat bagus dengan capaian 871,05% yang bisa dikatakan merupakan titik balik dari tahun 2023 yang menurun drastis karena fenomena alam EL-NINO.

c. Rata-rata Peningkatan Produksi Sektor Usaha Perikanan Budidaya

Jika dilihat dari tabel pencapaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) untuk Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Sektor Usaha Perikanan Budidaya dalam kurun waktu tahun 2020-2024 capaian kinerjanya sebesar 95,71%, hal ini disebabkan oleh beberapa kondisi yaitu adanya bencana Nasional COVID-19 pada tahun 2020 yang mana aktivitas ekonomi disektor perikanan dapat dikatakan lumpuh, ikan yang seharusnya dapat diangkat untuk dijual namun tertahan di kolam karena adanya kebijakan Pemerintah terkait dengan pembatasan sosial. Namun demikian setelah Pemerintah memberikan kebijakan baru berupa NEW NORMAL dan Normal menyebabkan aktivitas ekonomi disektor perikanan budidaya meningkat tajam mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

d. Rata-rata Peningkatan Produksi Sektor Usaha Olahan Hasil Perikanan.

Pada tabel pencapaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) untuk Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Sektor Usaha Olahan Hasil Perikanan dalam kurun waktu tahun 2020-2024 capaian kinerjanya sebesar 727,83%, Rata-Rata capaian kinerja sangat tinggi disebabkan oleh beberapa kondisi yaitu adanya dukungan kebijakan Pemerintah pasca pandemic COVID-19 yaitu NEW NORMAL, meningkatkan

permintaan berbagai produk aneka olahan hasil perikanan secara ONLINE, kondisi dimanfaatkan oleh Pengolah dan Pemasar Olahan Hasil Perikanan untuk meningkatkan kapasitas produksinya baik dalam bentuk Frozen Food maupun ikan segar.

Namun demikian pada tahun 2024 mengalami titik jenuh capaiannya kinerjanya hanya di 22,08% yang mana bukan berarti tidak ada peningkatan produksi dari tahun sebelumnya namun tingginya target yang telah ditetapkan dengan acuan tahun sebelumnya dan tidak melihat kondisi pemasaran ikan telah mengalami titik jenuh yang ditandai dengan menurunnya kapasitas produksi yang disebabkan oleh penurunan permintaan produk olahan hasil perikanan terutama ikan asap.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung adalah masyarakat pembudidaya ikan baik yang sudah bergabung dalam POKDAKAN (Kelompok Pembudidaya Ikan) maupun belum, masyarakat nelayan baik yang sudah bergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) maupun yang belum serta pengolah dan pemasar hasil perikanan Kabupaten Tulungagung baik yang sudah bergabung dalam kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (POKLAHSAR) maupun yang belum.

Sedangkan kelompok sasaran layanan mitra Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung

Tantangan dalam pelaksanaan pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Tulungagung di antaranya :

- a. Menurunnya kualitas dan kuantitas SDI Laut dan PUD;
- b. Over produksi perikanan budidaya akibat menurunnya daya serap pasar di kondisi-kondisi tertentu terutama pada musim panen ikan hasil tangkap laut;
- c. Meningkatnya harga input produksi (terutama pakan ikan) karena kebutuhan akan pakan mendominasi biaya produksi sampai dengan 70% dari total biaya produksi;
- d. Penurunan SDI di PUD juga disebabkan berkembangnya ikan invasif yang bersifat karnivora di PUD, khususnya di Waduk Wonorejo dan perairan di sekitarnya;
- e. Kondisi SDI yang di duga over exploited yang diindikasikan dengan semakin kecilnya ukuran ikan yang ditangkap, semakin lamanya waktu yang dibutuhkan untuk aktivitas penangkapan ikan, dan semakin rendahnya hasil tangkap;
- f. Masih minimnya sanitasi dan higienitas pada pengolahan ikan tradisional yang sering menyebabkan kerusakan produk baik disebabkan oleh bakteri dan jamur;
- g. Lemahnya kapasitas kelembagaan kelompok karena sebagian besar kelompok pelaku usaha perikanan belum berbadan hukum atau belum ber SKT (Surat Keterangan Terdaftar) sehingga menjadi kendala dalam penerimaan bantuan dari Pemerintah.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pembangunan di sektor Perikanan di antaranya:

- a. Kabupaten Tulungagung memiliki PUD yang relatif luas $\pm 504,5$ ha hal ini merupakan peluang untuk mengelola perikanan tangkap secara berkelanjutan;

- b. Potensi lahan seluas 357,84 Ha dan sumber air yang tersedia sepanjang tahun untuk kegiatan budidaya merupakan peluang untuk bagi pembudidaya ikan maupun nelayan dalam rangka memperoleh pendapatan alternatif melalui budidaya ikan;
- c. Meningkatnya permintaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan dan penyediaan produk olahan ikan yang higienis dan aman;
- d. Dari keseluruhan jumlah nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar di Kabupaten Tulungagung yang tergabung dalam kelompok masih relatif kecil dibandingkan dengan yang belum tergabung dalam kelompok, hal ini merupakan peluang untuk meningkatkan kapasitas usaha melalui pembentukan kelompok dan meningkatkan kapasitas kelompok tersebut sehingga dapat mencapai kelas utama.

2.6. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan

Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perikanan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten Berdasarkan hasil pemetaan permasalahan pembangunan berdasarkan tugas dan fungsinya diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.6. Pemetaan Permasalahan Pembangunan

No	Masalah	Penyebab Masalah
(1)	(2)	(3)
1	Belum optimalnya Pengelolaan PUD Oleh Kelompok dan Masyarakat	Kurangnya restocking Sumber Daya Ikan (SDI)
		Masih adanya kasus pelanggaran pengelolaan Sumber Daya Ikan
2	Belum optimalnya/rendahnya produktifitas nelayan tangkap	Kurangnya kompetensi kelompok nelayan
		Terbatasnya perijinan yang dimiliki nelayan
		Terbatasnya sarana tangkap nelayan
3	Belum optimalnya produktifitas budidaya ikan	Rendahnya ketersediaan pakan ikan mandiri
		Kurangnya pemanfaatan benih ikan berkualitas
		Tingginya angka kematian ikan karena penyakit
4	Belum optimalnya kelembagaan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan	Kurangnya penganekaragaman produk olahan hasil perikanan
		Kurangnya fasilitasi kemitraan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan
		Terbatasnya pemenuhan legalitas usaha pengolahan hasil perikanan
5	Terbatasnya ketersediaan bahan baku usaha pengolahan hasil perikanan sesuai standart	Belum optimalnya dalam penyerapan bahan baku lokal untuk industri olahan ikan
		Terbatasnya sarana prasarana logistik hasil perikanan yang higienis

2.7. Isu Strategis

Penentuan isu strategis berdasarkan pada akar permasalahan yang muncul dari perangkat daerah yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Keterkaitan antara permasalahan dengan isu strategis dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 2.7. Isu Permasalahan Perangkat Daerah

Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD	
			Global	Nasional	Regional		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Perikanan Tangkap Laut							
Panjang pantai 61,470 km	Belum Optimalnya/rendahnya produktivitas nelayan tangkap	Belum optimalnya pengelolaan potensi sektor unggulan daerah	Perubahan Iklim	Rendahnya Produktivitas	Pemantapan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Belum Optimalnya Produktivitas Sektor Usaha Perikanan baik Perikanan Tangkap, Budidaya maupun Pengolahan Hasil Perikanan,	
Jumlah nelayan sebanyak 1.092 nelayan (Nelayan penuh: 849 Orang, Sambilan Utama: 190 Orang dan Sambilan Tambahan: 53 Orang)							
Jumlah kapal sebanyak 426 unit							
Jumlah alat penangkapan ikan sebanyak 510 unit							
Perikanan Tangkap PUD							
Luas 504,5 Ha terdiri dari : Waduk/ cekdam 450 Ha, Danau/ telaga 17,4 Ha, Rawa 37 Ha serta Sungai sepanjang 408,65 km	Belum optimalnya Pengelolaan PUD Oleh Kelompok dan Masyarakat						
Jumlah alat penangkapan ikan sebanyak 354 unit							
Jumlah nelayan sebanyak 456 nelayan							

Luas Lahan : 358,05 Ha, Jumlah Total RTP Pembudidaya Ikan : 13.102 RTP Jumlah Kelompok : 532 Pokdakan	Belum optimalnya Pengelolaan PUD Oleh Kelompok dan Masyarakat					
Budidaya ikan air tawar di Kabupaten Tulungagung dikelompokkan menjadi 3 cabang usaha budidaya : Budidaya Ikan Hias Jumlah RTP Pembudidaya ikan hias :1.624 RTP Terpusat di 3 Kecamatan yaitu : Sumbergempol, Kedungwaru dan Boyolangu Produk Unggulan : ikan hias Maskoki (Ranchu, Oranda, Ryukin, Mutiara, Demekin), ikan hias Koi (Sanke, Kohaku, Sowa, Sushui, Asagi) dan Ikan Hias lainnya.	Belum optimalnya produktivitas budidaya ikan					
Budidaya Ikan Konsumsi Jumlah RTP pembudidaya ikan konsumsi sebanyak 10.930 RTP Produk Unggulan : ikan Lele, Gurami, Patin dan Nila						
Pembenihan Ikan Jumlah RTP Pembenih Ikan : 548 RTP Benih Ikan Gurami, Lele, Nila dan Ikan Hias						
Jumlah POKLAHSAR sebanyak 91 Kelompok . Jenis Kegiatan : Pemindangan, Pengasapan, Fillet Ikan dan Aneka Olahan berbahan dasar ikan (krispy kulit, sumpia ebi,	Belum optimalnya kelembagaan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan					

abon ikan, dan lain-lain). Jumlah RTP sebanyak 545 RTP dengan jumlah pelaku usaha : 1298 pelaku usaha.						
	Terbatasnya ketersediaan bahan baku usaha pengolahan hasil perikanan sesuai standart					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029

Tujuan akan mengarahkan perumusan kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan.

Untuk mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Tulungagung yaitu Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan, sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Dinas Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pemberdayaan nelayan kecil dalam Kaerah kabupaten/kota Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan Pengelolaan pembudidayaan ikan	Meningkatnya Produksi Usaha Sektor Perikanan		Rata-rata Persentase peningkatan Produksi Usaha Sektor rikanan	22,30	7,18	7,56	7,95	8,36	8,80	9,27	
Sasaran RPJMD yang Relecan : Meningkatnya nilai tambah perekonomian daerah berbasis potensi lokal		Meningkatnya Produksi Usaha Perikanan Tangkap	Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Usaha Perikanan Tangkap	52,26	6,50	6,82	7,16	7,51	7,88	8,26	
		Meningkatnya Produksi Usaha Perikanan Budidaya	Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Usaha Perikanan Budidaya	8,61	8,80	9,28	9,77	10,30	10,87	11,47	

		Meningkatnya Produksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	6,02	6,25	6,58	6,92	7,28	7,66	8,06	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,05	82,06	82,25	82,50	82,75	83,00	83,25	

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan cara-cara yang ditempuh dengan memilih program-program prioritas sesuai tujuan dan sasaran. Hal ini sesuai dengan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dinyatakan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Dengan demikian strategi dan arah kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung merupakan upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja capaian dalam 5 tahun. Strategi Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung dalam hal ini merupakan langkah-langkah atau cara-cara yang ditempuh untuk merealisasikan tujuan dari Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung

Strategi dan arah kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung disusun secara komprehensif agar dapat mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. Untuk mewujudkan hal tersebut arah kebijakan dibuat untuk mengarahkan rumusan strategi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, melalui arah kebijakan dan strategi dapat dijelaskan secara sistematis dan tetap menjadi rujukan dalam setiap jalannya kegiatan pemerintahan selama 5 (lima) tahun. Perumusan strategi didasarkan pada kriteria: 1) Strategi yang realistis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan; 2) Menganalisis dan mengevaluasi faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan; 3) Mengevaluasi berbagai faktor internal (kekuatan dan kelemahan), eksternal (peluang dan tantangan) dalam upaya merumuskan strategi yang tepat.

Strategi merupakan rangkaian tahapan yang berisi *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tahapan dimaksud adalah penahapan

pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2. Penahapan Pembangunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung

Penahapan Pembangunan Renstra PD				
Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Optimalisasi produksi sektor usaha perikanan berkelanjutan	Optimalisasi nilai tambah usaha produksi perikanan	Peningkatan promosi dan pemasaran hasil produksi perikanan	Peningkatan daya saing hasil produksi usaha perikanan	Pemantapan hilirisasi usaha perikanan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perikanan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)
Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota.	Peningkatan kapasitas lembaga petani ikan budidaya dan nelayan, antara lain dalam peningkatan produksi, keterjangkauan pakan, pemasaran dan olahan hasil perikanan	Peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku usaha perikanan	
Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan.			
Pengelolaan pembudidayaan ikan	Pengembangan teknologi tepat guna di sektor agro (pertanian, peternakan dan perikanan).	Peningkatan produksi usaha perikanan berkelanjutan	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program dan Kegiatan 2025 - 2029

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan di sub sector perikanan, serta mencapai target sasaran strategis sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya dibutuhkan program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan perikanan di Kabupaten Tulungagung serta mensukseskan tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Tulungagung menggunakan Teknik Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD sebagaimana pada tabel. 4.1. berikut sedangkan secara rinci rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Perikanan Provinsi Kabupaten Tulungagung tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 pada tabel 4.2. Dari uraian program, kegiatan dan sub kegiatan terdapat program prioritas yaitu Program Pengelolaan Perikanan Budidaya sebagaimana terdapat pada tabel 4.3.

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tabel 4.4. sedangkan penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) seperti pada tabel 4.5.

Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
NSPK:Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah Kabupaten/kota Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan Pengelolaan pembudidayaan ikan Sasaran RPJMD yang Relevan : Meningkatnya nilai tambah perekonomian daerah berbasis potensi lokal	Meningkatnya Produksi Usaha Sektor Perikanan				Rata-rata Persentase peningkatan Produksi Usaha Sektor Perikanan	
		Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap			Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Usaha Perikanan Tangkap	
			Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Tangkap melalui Peningkatan Produktivitas Nelayan dan Pengelolaan Perairan Darat		Jumlah produksi perikanan tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
					Produksi Perikanan Tangkap	
					Persentase PUD yang dikelola oleh kelompok	
					Persentase Produktivitas nelayan tangkap	
				Meningkatnya Sumber Daya Ikan (SDI)	Persentase peningkatan restocking Sumber Daya Ikan (SDI)	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
					Penurunan jumlah kasus pelanggaran pengelolaan Sumber Daya Ikan	
				Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
				Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
				Meningkatnya kompetensi kelompok nelayan	Jumlah kelompok nelayan yang terlatih	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
					Persentase peningkatan perijinan yang dimiliki nelayan	
					Persentase peningkatan sarana tangkap nelayan	

				Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
				Meningkatnya jumlah ikan yang dilelang di TPI	Jumlah Ikan yang dilelang	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
				Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
		Meningkatnya Produksi Usaha Perikanan Budidaya			Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Usaha Perikanan Budidaya	
		Meningkatnya Produktivitas dan Efisiensi Usaha Perikanan Budidaya melalui Ketersediaan Pakan, Pemanfaatan Benih Berkualitas, dan Pengendalian Kematian Ikan			Jumlah produksi perikanan Budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
					Produksi Perikanan Budidaya	
					Persentase Pembudidayaan Ikan Yang Tercukupi Kebutuhan Pakannya	
					Persentase Pembudidayaan Ikan yang memanfaatkan Benih ikan berkualitas	
					Persentase kematian ikan	
				Meningkatnya ketersediaan bahan baku pakan ikan mandiri	Persentase ketersediaan bahan baku pakan ikan mandiri	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
					Jumlah kemitraan pakan ikan	
					Jumlah Pembenih Ikan Yang Bersertifikat	
				Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
				Meningkatnya Kualitas Sarana Produksi Benih Ikan	Jumlah sarana produksi benih ikan berkualitas	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
					Jumlah Kasus Penyakit Ikan	

				Persentase pembudidaya ikan yang menerapkan lingkungan budidaya sesuai standar	
			Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Meningkatnya Produksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan			Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	
		Menguatnya Rantai Nilai Perikanan melalui Peningkatan Konsumsi, Kapasitas Kelompok Usaha, dan Ketersediaan Bahan Baku		Angka Konsumsi Ikan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
				Jumlah kelompok yang meningkat	
				Persentase ketersediaan bahan baku untuk usaha pengolahan hasil perikanan	
			Meningkatnya sarana prasarana logistik hasil perikanan yang higienis	Jumlah Diversifikasi Produk Olahan Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
				Jumlah Kemitraan Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	
				Jumlah Pemenuhan Legalitas Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	
			Terlaksananya pembinaan terhadap	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan	Pembinaan terhadap penerapan Persyaratan

				Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala usaha dan Risiko
				Meningkatnya sarana prasarana logistik hasil perikanan yang higienis	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Logistik Hasil Perikanan yang Higienis	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
				Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
				Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Terfasilitasi	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Tabel 4.2. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				8.720.400.075,00		8.858.444.008,00		8.963.327.982,00		9.070.350.118,00		9.179.012.913,00		
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.873.600.075,00		5.966.579.164,00		6.037.223.461,00		6.109.307.909,00		6.182.497.417,00		
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	IKM Perangkat Daerah (Indeks)	92,50	93,50	5.873.600.075,00	94,50	5.966.579.164,00	95,50	6.037.223.461,00	96,50	6.109.307.909,00	97,50	6.182.497.417,00	3.25.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS PERIKANAN	
3.25.01.2.01 - Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.206.000,00		4.272.581,00		4.323.168,00		4.374.787,00		4.427.197,00		
Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai standar regulasi	11	11	4206000	11	4727581	11	4323168	11	4374787	12	4427197		
3.25.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				416.000,00		422.585,00		427.589,00		432.694,00		437.878,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4,00	4,00	416.000,00	4,00	422.585,00	4,00	427.589,00	4,00	432.694,00	5,00	437.878,00		
3.25.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				2.790.000,00		2.834.166,00		2.867.722,00		2.901.963,00		2.936.728,00		
Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	2,00	2,00	2.790.000,00	2,00	2.834.166,00	2,00	2.867.722,00	2,00	2.901.963,00	2,00	2.936.728,00		

3.25.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.000.000,00		1.015.830,00		1.027.857,00		1.040.130,00		1.052.591,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5,00	5,00	1.000.000,00	5,00	1.015.830,00	5,00	1.027.857,00	5,00	1.040.130,00	5,00	1.052.591,00		
3.25.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
Administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai standar regulasi	12	12	5.187.290.275,00	12	5.269.405.080,00	12	5.331.794.836,00	12	5.395.456.467,00	12	5.460.094.035,00		
3.25.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.093.196.575,00		5.173.821.877,00		5.235.079.928,00		5.297.586.782,00		5.361.051.872,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	35	40	5.093.196.575,00	40,00	5.173.821.877,00	40,00	5.235.079.928,00	40,00	5.297.586.782,00	40,00	5.361.051.872,00		
3.25.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				92.640.000,00		94.106.491,00		95.220.712,00		96.357.647,00		97.512.012,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	92.640.000,00	12,00	94.106.491,00	12	95.220.712,00	12	96.357.647,00	12	97.512.012,00		
3.25.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				613.700,00		623.415,00		630.796,00		638.328,00		645.975,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	613.700,00	1	623.415,00	1	630.796,00	1	638.328,00	1	645.975,00		
3.25.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				840.000,00		853.297,00		863.400,00		873.709,00		884.176,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2	2	840.000,00	2	853.297,00	2	863.400,00	2	873.709,00	2	884.176,00		
3.25.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														

Pegawai perangkat daerah terfasilitasi administrasi kepegawaian sesuai standar	Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian sesuai standar	100	100	-	100	45.000.000,00	100	45.532.800,00	100	46.076.462,00	100	46.628.457,00		
3.25.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		35.000.000,00		35.414.400,00		35.837.248,00		36.266.578,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	70	70	0,00	70	35.000.000,00	70	35.414.400,00	70	35.837.248,00	70	36.266.578,00		
3.25.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0,00		10.000.000,00		10.118.400,00		10.239.214,00		10.361.879,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	14	14	0,00	14	10.000.000,00	14	10.118.400,00	14	10.239.214,00	14	10.361.879,00		
3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	88,62	100	88.392.600,00	100	89.791.854,00	100	90.854.991,00	100	91.939.800,00	100	93.041.237,00		
3.25.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.227.100,00		5.309.845,00		5.372.714,00		5.436.864,00		5.501.997,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	5.227.100,00	12	5.309.845,00	12	5.372.714,00	12	5.436.864,00	12	5.501.997,00		
3.25.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				38.269.500,00		38.875.306,00		39.335.590,00		39.805.257,00		40.282.124,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	38.269.500,00	12	38.875.306,00	12	39.335.590,00	12	39.805.257,00	12	40.282.124,00		
3.25.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.106.000,00		4.170.998,00		4.220.383,00		4.270.774,00		4.321.938,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	4.106.000,00	12	4.170.998,00	12	4.220.383,00	12	4.270.774,00	12	4.321.938,00		

3.25.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				5.610.000,00		5.698.806,00		5.766.280,00		5.835.130,00		5.905.034,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	5.610.000,00	12	5.698.806,00	12	5.766.280,00	12	5.835.130,00	12	5.905.034,00		
3.25.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35.180.000,00		35.736.899,00		36.160.024,00		36.591.775,00		37.030.144,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	35.180.000,00	12	35.736.899,00	12	36.160.024,00	12	36.591.775,00	12	37.030.144,00		
3.25.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				518.161.200,00		457.363.692,00		462.778.878,00		468.304.457,00		473.914.745,00		
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	95,03	100	518.161.200,00	100	528363692	100	532595698	100	538955032	100	545411713		
3.25.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				251.627.500,00		186.610.763,00		188.820.235,00		191.074.748,00		193.363.824,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	251.627.500,00	12	186.610.763,00	12	188.820.235,00	12	191.074.748,00	12	193.363.824,00		
3.25.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				27.292.100,00		27.724.134,00		28.052.388,00		28.387.333,00		28.727.413,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	27.292.100,00	12	27.724.134,00	12	28.052.388,00	12	28.387.333,00	12	28.727.413,00		
3.25.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				239.241.600,00		243.028.795,00		245.906.255,00		248.842.376,00		251.823.508,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	239.241.600,00	12	243.028.795,00	12	245.906.255,00	12	248.842.376,00	12	251.823.508,00		
3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				75.550.000,00		100.745.957,00		101.936.788,00		103.155.937,00		104.391.746,00		

Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Barang milik daerah yang terpelihara	85,54	100	75.550.000,00	100	76745957	100	77654629	100	78581825	100	79523235		
3.25.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				75.550.000,00		76.745.957,00		77.654.629,00		78.581.825,00		79.523.235,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	53	53	75.550.000,00	53	76.745.957,00	53	77.654.629,00	53	78.581.825,00	53	79.523.235,00		
3.25.01.2.09.0008 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		24.000.000,00		24.284.159,00		24.574.112,00		24.868.511,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1	0,00	1	24.000.000,00	1	24.284.159,00	1	24.574.112,00	1	24.868.511,00		
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP														
Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Tangkap melalui Peningkatan Produktivitas Nelayan dan Pengelolaan Perairan Darat	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	9.191,08	10.456,08	285.000.000,00	10.615,52	289.511.550,00	11.137,81	292.939.365,00	11.685,79	296.437.062,00	12.260,73	299.988.378,00	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN	
	Produksi Perikanan Tangkap (%)	81,87	100											
	Persentase produktivitas nelayan tangkap (%)	-27,87	5,74											
	Persentase PUD yang dikelola oleh Kelompok (%)	75,00	80,00											
3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota														
Meningkatnya Pengelolaan SDI Perairan Umum Daratan	Persentase peningkatan restocking SDI	298	10	150000000	11	152374500	12	154178814	13	156019507	14	157888620		

	Penurunan jumlah kasus pelanggaran pengelolaan Sumber Daya Ikan	15	13		12		11		10		9			
3.25.03.2.01.0002 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap				100.000.000,00		101.583.000,00		102.785.743,00		104.013.004,00		105.259.080,00		
Tersediannya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	70,00	7,00	100.000.000,00	7,00	101.583.000,00	7,00	102.785.743,00	7,00	104.013.004,00	7,00	105.259.080,00		
3.25.03.2.01.0004 - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				50.000.000,00		50.791.500,00		51.392.871,00		52.006.502,00		52.629.540,00		
Tersediannya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	11,00	15,00	50.000.000,00	17,00	50.791.500,00	19,00	51.392.871,00	21,00	52.006.502,00	23,00	52.629.540,00		
3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota														
Meningkatnya Produktivitas nelayan tangkap laut	Jumlah kelompok nelayan yang terlatih	10	15	100.000.000,00	15	101.583.000,00	15	102.785.743,00	15	104.013.004,00	15	105.259.080,00		
	Persentase peningkatan perijinan yang dimiliki nelayan	-53	6		7		8		9		10			
	Persentase peningkatan sarana tangkap nelayan	15	6		7		8		9		10			
3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil				100.000.000,00		101.583.000,00		102.785.743,00		104.013.004,00		105.259.080,00		
Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	200,00	250	100.000.000,00	255,00	101.583.000,00	260,00	102.785.743,00	265,00	104.013.004,00	270,00	105.259.080,00		
3.25.03.2.03 - Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				35.000.000,00		35.554.050,00		35.975.008,00		36.404.552,00		36.840.678,00		
Meningkatnya jumlah ikan yang dilelang di TPI	Jumlah ikan yang dilelang	395,41	435,27	35000000	465,69	35554050	479,15	35975010	502,73	36404552	527,46	36840678		
3.25.03.2.03.0002 - Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				35.000.000,00		35.554.050,00		35.975.008,00		36.404.552,00		36.840.678,00		
Tersediannya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan)	1	1	35.000.000,00	1	35.554.050,00	1	35.975.008,00	1	36.404.552,00	1	36.840.678,00		

3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA														
Meningkatnya Produktivitas dan Efisiensi Usaha Perikanan Budidaya melalui Ketersediaan Pakan, Pemantapan Benih Berkualitas, dan Pengendalian Kemalian Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	49.221	58.522,12	2.126.600.000,00	57.780,90	2.160.264.078,00	60.953,07	2.185.841.604,00	64.299,40	2.211.940.552,00	67.829,43	2.238.439.601,00	3.250.000.000,01.0000 - DINAS PERIKANAN	
	Produksi Perikanan Budidaya (%)	117,12	100		100		100		100		100			
	Persentase Pembudidayaan Ikan Yang Tercukupi Kebutuhan Pakannya (%)	90,34	81,27		81,84		92,41		92,88		93,52			
	Persentase Pembudidayaan Ikan yang memanfaatkan Benih ikan berkualitas (%)	4,15	4,58		4,80		5,04		5,30		5,56			
	Persentase Kemalian Ikan (%)	10,00	9,00		8,50		8,00		7,50		7,00			
3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil														
"Meningkatnya ketersediaan bahan baku pakan ikan mandiri"	Persentase ketersediaan bahan baku pakan ikan mandiri	10	20	100000000	22	101583000	24	102785743	26	104.013.004,00	28	105.259.080,00		
	Jumlah kemitraan pakan ikan	2	6		8		10		12		14			
	Jumlah pembenih ikan yang bersertifikat	2	6		8		10		12		14			
3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				100.000.000,00		101.583.000,00		102.785.743,00		104.013.004,00		105.259.080,00		
Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	4,00	6,00	100.000.000,00	8,00	101.583.000,00	10,00	102.785.743,00	12,00	104.013.004,00	14,00	105.259.080,00		
3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				2.026.600.000,00		2.058.681.078,00		2.083.055.861,00		2.107.927.548,00		2.133.180.521,00		

"Meningkatnya Kualitas Sarana Produksi Benih Ikan "	Jumlah sarana produksi benih berkualitas	2	4	150000000	5	152374500	6	154178614	7	156019506,73	8	157888620		
	jumlah kasus penyakit ikan	16	14		13		12		11		10			
	persentase pembudidaya ikan yang menerapkan lingkungan budidaya sesuai standar	10	14		16		18		20		22			
3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000,00		101.583.000,00		102.785.743,00		104.013.004,00		105.259.080,00		
Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	83,00	87,00	100.000.000,00	89,00	101.583.000,00	91,00	102.785.743,00	93,00	104.013.004,00	95,00	105.259.080,00		
3.25.04.2.04.0004 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.791.500,00		51.392.871,00		52.006.502,00		52.629.540,00		
Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	12	12	50.000.000,00	12	50.791.500,00	12	51.392.871,00	12	52.006.502,00	12	52.629.540,00		
3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1.876.600.000,00		1.906.306.578,00		1.928.877.247,00		1.951.908.042,00		1.975.291.901,00		
Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	37,00	30,00	1.876.600.000,00	35,00	1.906.306.578,00	40,00	1.928.877.247,00	45,00	1.951.908.042,00	50,00	1.975.291.901,00		
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN														
Menguatnya Rantai Nilai Perikanan melalui Peningkatan Konsumsi, Kapasitas Kelompok Usaha, dan Ketersediaan Bahan Baku	Persentase ketersediaan bahan baku untuk usaha pengolahan hasil perikanan (%)	88,90	90,46	435.200.000,00	90,69	442.089.216,00	91,59	447.323.552,00	92,51	452.664.595,00	93,43	458.087.517,00	3.25.0.00.0.00.01 0000 - DINAS PERIKANAN	

	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	40,03	25,05		26,02		27,36		28,81		30,32			
	Jumlah Kelompok yang Meningkat kelasnya (Kelompok)	1,00	3,00		4,00		5,00		6,00		7,00			
3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil														
Meningkatnya sarana prasarana logistik hasil perikanan yang higienis	jumlah diversifikasi produk olahan hasil perikanan	4	8	50000000	10	50.791.500,00	12	51.392.871,00	14	52.006.502,00	16	52.629.540,00		
	jumlah kemitraan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan	1	3		4		5		6		7			
	jumlah pemenuhan legalitas usaha pengolahan hasil perikanan	4	6		7		8		9		10			
3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				50.000.000,00		50.791.500,00		51.392.871,00		52.006.502,00		52.629.540,00		
Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	5,00	12,00	50.000.000,00	14,00	50.791.500,00	16,00	51.392.871,00	18,00	52.006.502,00	20,00	52.629.540,00		
3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota														
Meningkatnya sarana prasarana logistik hasil perikanan yang higienis	Persentase peningkatan sarana prasarana logistik hasil perikanan yang higienis	14	11	385.200.000,00	12	391.297.716,00	13	395.930.681,00	14	400.658.093,00	15	405.457.977,00		

3.25.06.2.03.0001 - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				250.000.000,00		253.957.500,00		256.964.357,00		260.032.511,00		263.147.701,00		
Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	593,70	670,23	250.000.000,00	691,79	253.957.500,00	727,96	256.964.357,00	766,03	260.032.511,00	805,94	263.147.701,00		
3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				135.200.000,00		137.340.216,00		138.966.324,00		140.625.582,00		142.310.276,00		
Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	50,00	52,00	135.200.000,00	54,00	137.340.216,00	56,00	138.966.324,00	58,00	140.625.582,00	60,00	142.310.276,00		

Tabel 4.3. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah				
No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Produktivitas dan Efisiensi Usaha Perikanan Budidaya melalui Ketersediaan Pakan, Pemanfaatan Benih Berkualitas, dan Pengendalian Kematian Ikan	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
			Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung

Indikator Kinerja Utama (IKU) PD										
No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Rata-rata persentase peningkatan produksi usaha sektor perikanan	%	22,30	7,18	7,56	7,95	8,36	8,80	9,27	
2	Rata-rata persentase peningkatan produksi usaha perikanan tangkap	%	52,26	6,50	6,82	7,16	7,51	7,88	8,26	
3	Rata-rata persentase peningkatan produksi usaha perikanan budidaya	%	8,61	8,80	9,28	9,77	10,30	10,87	11,47	
4	Rata-rata persentase peningkatan produksi usaha pengolahan hasil perikanan	%	6,02	6,25	6,58	6,92	7,28	7,66	8,06	
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	84,05	82,06	82,25	82,50	82,75	83,00	83,25	

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) PD

Indikator Kinerja Kunci PD										
No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Produksi Perikanan Tangkap	%	81,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Produksi Perikanan Budidaya	%	117,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

BAB V. PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung Tahun 2026 – 2029 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan pada periode Renstra Tahun 2026 - 2029. Pelaksanaan rencana strategis ini sangat memerlukan partisipasi dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Semoga rencana strategis ini dapat diimplementasikan dengan baik dan konsisten guna mendukung terwujudnya *good governance*.



Tabel Penyusunan Renstra Berdasarkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025
Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1. Pemetaan Permasalahan

Tabel Pemetaan Permasalahan Pembangunan

No	Masalah	Penyebab Masalah
(1)	(2)	(3)
1	Belum optimalnya Pengelolaan PUD Oleh Kelompok dan Masyarakat	Kurangnya restocking Sumber Daya Ikan (SDI)
		Adanya kasus pelanggaran pengelolaan Sumber Daya Ikan
2	Belum optimalnya/rendahnya produktivitas nelayan tangkap	Kurangnya kompetensi kelompok nelayan
		Terbatasnya perijinan yang dimiliki nelayan
		Terbatasnya sarana tangkap nelayan
3	Belum optimalnya produktivitas budidaya ikan	Rendahnya ketersediaan pakan ikan mandiri
		Belum optimalnya pemanfaatan benih ikan berkualitas
		Tingginya angka kematian ikan karena penyakit
6	Belum optimalnya kelembagaan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan	Kurangnya penganekaragaman produk olahan hasil perikanan
		Kurangnya fasilitasi kemitraan pelaku usaha
		Terbatasnya pemenuhan legalitas usaha pengolahan
7	Terbatasnya ketersediaan bahan baku usaha pengolahan hasil perikanan sesuai standart	Belum optimalnya dalam penyerapan bahan baku lokal untuk industri olahan ikan
		Terbatasnya sarana prasarana logistik hasil perikanan

Keterangan:
1. Dalam Inmendagri 2 Tahun 2025, perumusan permasalahan disajikan dalam kertas kerja. Namun, tabel kertasnya tidak diatur, sehingga minimal pemetaan permasalahan disajikan dalam 2 level (masalah dan penyebab masalah)
2. Masalah levelnya lebih makro, sedangkan penyebab masalah lebih mikro dan detail, sehingga satu masalah bisa disebabkan beberapa penyebab masalah
3. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia
4. Contoh kalimat masalah: Belum optimalnya, kurangnya, menurunnya, masih adanya, ...semakin meningkat, dll

LAMPIRAN

**RENSTRA
TAHUN
2025-2029**

**Dinas Perikanan
Kabupaten Tulungagung**



Tabel Penyusunan Renstra Berdasarkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025
Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1. Pemetaan Permasalahan

Tabel Pemetaan Permasalahan Pembangunan

No	Masalah	Penyebab Masalah
(1)	(2)	(3)
1	Belum optimalnya Pengelolaan PUD Oleh Kelompok dan Masyarakat	Kurangnya restocking Sumber Daya Ikan (SDI)
		Adanya kasus pelanggaran pengelolaan Sumber Daya Ikan
2	Belum optimalnya/rendahnya produktivitas nelayan tangkap	Kurangnya kompetensi kelompok nelayan
		Terbatasnya perijinan yang dimiliki nelayan
		Terbatasnya sarana tangkap nelayan
3	Belum optimalnya produktivitas budidaya ikan	Rendahnya ketersediaan pakan ikan mandiri
		Belum optimalnya pemanfaatan benih ikan berkualitas
		Tingginya angka kematian ikan karena penyakit
6	Belum optimalnya kelembagaan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan	Kurangnya penganekaragaman produk olahan hasil perikanan
		Kurangnya fasilitasi kemitraan pelaku usaha
		Terbatasnya pemenuhan legalitas usaha pengolahan
7	Terbatasnya ketersediaan bahan baku usaha pengolahan hasil perikanan sesuai standart	Belum optimalnya dalam penyerapan bahan baku lokal untuk industri olahan ikan
		Terbatasnya sarana prasarana logistik hasil perikanan

Keterangan:

1. Dalam Inmendagri 2 Tahun 2025, perumusan permasalahan disajikan dalam kertas kerja. Namun, tabel kertasnya tidak diatur, sehingga minimal pemetaan permasalahan disajikan dalam 2 level (masalah dan penyebab masalah)

2. Masalah levelnya lebih makro, sedangkan penyebab masalah lebih mikro dan detail, sehingga satu masalah bisa disebabkan beberapa penyebab masalah

3. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia

4. Contoh kalimat masalah: Belum optimalnya, kurangnya, menurunnya, masih adanya, ...semakin meningkat, dll



Tabel Penyusunan Renstra Berdasarkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025
Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2. Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Tabel Isu Strategis Perangkat Daerah						
Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perikanan Tangkap Laut						
Panjang pantai 61,470 km	Belum Optimalnya/rendahnya produktifitas nelayan tangkap	Belum optimalnya pengelolaan potensi sektor unggulan daerah	Perubahan Iklim	Rendahnya Produktifitas	Pemantapan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Belum Optimalnya Produktifitas Sektor Usaha Perikanan
Jumlah nelayan sebanyak 1.092 nelayan (Nelayan penuh: 849 Orang, Sambilan Utama: 190 Orang dan Sambilan Tambahan: 53 Orang)						
Jumlah kapal sebanyak 426 unit						
Jumlah alat penangkapan ikan sebanyak 510 unit						
Perikanan Tangkap PUD						
Luas 504,5 Ha terdiri dari : Waduk/ cekdam 450 Ha, Danau/ telaga 17,4 Ha, Rawa 37 Ha serta Sungai sepanjang 408,65 km	Belum optimalnya Pengelolaan PUD Oleh Kelompok dan Masyarakat					
Jumlah alat penangkapan ikan sebanyak 354 unit						
Jumlah nelayan sebanyak 456 nelayan						

Luas Lahan : 358,05 Ha, Jumlah Total RTP Pembudidaya Ikan : 13.102 RTP Jumlah Kelompok : 532 Pokdakan						
Budidaya ikan air tawar di Kabupaten Tulungagung dikelompokkan menjadi 3 cabang	Belum optimalnya Pengelolaan PUD Oleh Kelompok dan Masyarakat					
Budidaya Ikan Konsumsi Jumlah RTP pembudidaya ikan konsumsi sebanyak 10.930 RTP	Belum optimalnya produktivitas budidaya ikan					
Pembenihan Ikan Jumlah RTP Pembenih Ikan : 548 RTP Benih Ikan Gurami, Lele, Nila dan Ikan Hias						
Jumlah POKLAHSAR sebanyak 91 Kelompok . Jenis Kegiatan : Pemindangan, Pengasapan, Fillet Ikan dan Aneka Olahan berbahan dasar ikan (krispy kulit, sumpia ebi, abon ikan, dan lain-lain). Jumlah RTP sebanyak 545 RTP dengan jumlah pelaku usaha : 1298 pelaku usaha.	Belum optimalnya kelembagaan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan					
	Terbatasnya ketersediaan bahan baku usaha pengolahan hasil perikanan sesuai standart					

Keterangan:

Kolom 1: Potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat. Dirumuskan dalam kalimat positif bukan masalah

Kolom 2: Permasalahan perangkat daerah bisa diambil dari tabel pemetaan permasalahan sebelumnya. Diambil yang dianggap paling urgent dan mendesak untuk segera direspon

Kolom 3: Isu KLHS RPJMD bisa mengambil dari isu pada dokumen KLHS RPJMD yang relevan dengan kewenangan Perangkat Daerah

Kolom 4: Isu global bisa mengacu dari tujuan SDGs atau isu global lain yang relevan dengan kewenangan Perangkat Daerah

Kolom 5: Isu nasional bisa mengambil isu strategis dari dokumen RPJMN dan Renstra Kementerian terkait yang relevan dengan kewenangan Perangkat Daerah

Kolom 6: Isu regional bisa mengambil dari isu RPJMD Provinsi dan OPD di level Provinsi yang terkait

Kolom 7: Penentuan isu strategis perangkat daerah. Isu strategis bisa lebih dari satu dan bisa menggunakan bahasa masalah/netral. Setiap isu strategis selanjutnya dideskripsikan minimal 1-2 paragraf dalam dokumen Renstra

Pengertian Isu Strategis:

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang dimasa mendatang, sehingga harus diperhatikan karena memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan

Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis.

Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan

Isu strategis memiliki karakteristik penting, mendesak, dan mendasar

Cara mengidentifikasi isu strategis bisa melihat dari berbagai isu pada lingkungan dinamis (isu global, nasional, regional) yang dapat mempengaruhi Perangkat Daerah secara langsung maupun tidak langsung



Tabel Penyusunan Renstra Berdasarkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025
Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

3. Tabel Tujuan dan Sasaran Renstra PD

3. Tabel Tujuan dan Sasaran Renstra PD											
NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Nelayan Kecil Yang Terlatih dan Terfasilitasi	Meningkatnya Produksi Usaha Sektor Perikanan		Rata-rata Persentase peningkatan Produksi Usaha Sektor Perikanan	22,30	7,18	7,56	7,95	8,36	8,80	9,27	
Meningkatnya Pembudidaya Ikan Kecil Yang Terlatih		Meningkatnya Produksi Usaha Perikanan Tangkap	Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Usaha Perikanan Tangkap	52,26	6,50	6,82	7,16	7,51	7,88	8,26	
Meningkatnya Prasarana dan Sarana Produksi Budidaya Ikan		Meningkatnya Produksi Usaha Perikanan Budidaya	Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Usaha Perikanan Budidaya	8,61	8,80	9,28	9,77	10,30	10,87	11,47	
Meningkatnya stabilitas dan nilai tambah perekonomian daerah		Meningkatnya Produksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	8,61	8,80	9,28	9,77	10,30	10,87	11,47	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,05	82,06	82,25	82,5	82,75	83	83,25	

Keterangan:

Kolom 1: NSPK bisa diambil dari lampiran UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan/atau regulasi terkait urusan masing2. Sasaran RPJMD bisa diambil dari sasaran RPJMD yang relevan dengan kewenangan PD
Kolom 2: Tujuan Renstra. Direkomendasi setiap OPD memiliki 1 tujuan, termasuk OPD yang mengampu lebih dari 1 urusan. Namun sasaran dapat berdasarkan urusan. Tujuan dan Sasaran dirumuskan dalam kalimat kondisi
Kolom 3: Sasaran Renstra. Sasaran diturunkan dari tujuan. Dirumuskan dalam kalimat kondisi
Kolom 4: Indikator Tujuan dan Sasaran. Indikator tujuan lebih makro dibanding indikator sasaran
Kolom 5: Capaian indikator tujuan dan sasaran tahun 2024
Kolom 6-11: Target indikator tujuan dan sasaran tahun 2015-2030



Tabel Penyusunan Renstra Berdasarkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025
Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

4. Tabel Penahapan Pembangunan Renstra PD

Penahapan Pembangunan Renstra PD				
Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Optimalisasi produksi sektor usaha perikanan berkelanjutan	Optimalisasi nilai tambah usaha produksi perikanan	Peningkatan promosi dan pemasaran hasil produksi perikanan	Peningkatan daya saing hasil produksi usaha perikanan	Pemantapan hilirisasi usaha perikanan

Keterangan:

Strategi Renstra adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan

Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD

Penahapan di Renstra bisa menggunakan beberapa pendekatan berikut:

1. Bisa merujuk pada tahapan yang ada di RPJMD, tinggal menyesuaikan dengan kewenangan yang ada di OPD
2. Bisa menggunakan pendekatan tahapan pembangunan: penguatan fondasi, akselerasi, ekspansi, penguatan daya saing dan perwujudan kondisi yang diinginkan



Tabel Penyusunan Renstra Berdasarkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025
Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

5. Tabel Arah Kebijakan PD

Arah Kebijakan Renstra PD			
Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota.	Pengembangan teknologi tepat guna di sektor agro (pertanian, peternakan dan perikanan).	Peningkatan produksi usaha perikanan berkelanjutan	
Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan.	Peningkatan kapasitas lembaga petani ikan budidaya dan nelayan, antara lain dalam peningkatan produksi, keterjangkauan pakan, pemasaran dan olahan hasil perikanan	Peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku usaha perikanan	
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			



Tabel Penyusunan Renstra Berdasarkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025
Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

6. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD							
NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NSPK:Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah Kabupaten/kota	Meningkatnya Produksi Usaha Sektor Perikanan				Rata-rata Persentase peningkatan Produksi Usaha Sektor Perikanan		
Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan Pengelolaan pembudidayaan ikan		Meningkatnya produksi usaha perikanan tangkap			Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Usaha Perikanan Tangkap		
Sasaran RPJMD yang Relevan :			Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Tangkap		Jumlah produksi perikanan tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
Meningkatnya nilai tambah perekonomian daerah berbasis potensi					Produksi Perikanan Tangkap		
					Persentase PUD yang dikelola oleh kelompok		
					Persentase Produktivitas nelayan tangkap		
				Meningkatnya Sumber Daya Ikan (SDI)	Persentase peningkatan restocking Sumber Daya Ikan (SDI)	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Penurunan jumlah kasus pelanggaran pengelolaan Sumber Daya Ikan		
				Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	

				Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
				Meningkatnya kompetensi kelompok nelayan	Jumlah kelompok nelayan yang terlatih	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase peningkatan perijinan yang dimiliki nelayan		
					Persentase peningkatan sarana tangkap nelayan		
				Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
				Meningkatnya jumlah ikan yang dilelang di TPI	Jumlah Ikan yang dilelang	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	
				Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
		Meningkatnya Produksi Usaha Perikanan Budidaya			Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Usaha Perikanan Budidaya		
			Meningkatnya Produktivitas dan Efisiensi Usaha Perikanan Budidaya melalui Ketersediaan Pakan, Pemanfaatan Benih Berkualitas, dan Pengendalian Kematian Ikan		Jumlah produksi perikanan Budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
					Produksi Perikanan Budidaya		
					Persentase Pembudidaya Ikan Yang Tercukupi Kebutuhan Pakannya		
					Persentase Pembudidaya Ikan yang memanfaatkan Benih ikan berkualitas		
					Persentase kematian Ikan		
				Meningkatnya ketersediaan bahan baku pakan ikan mandiri	Persentase ketersediaan bahan baku pakan ikan mandiri	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah kemitraan pakan ikan		
					Jumlah Pembudidaya Ikan Yang Bersertifikat		

				Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
				Meningkatnya Kualitas Sarana Produksi Benih Ikan	Jumlah sarana produksi benih ikan berkualitas	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Kasus Penyakit Ikan		
					Persentase pembudidaya ikan yang menerapkan lingkungan budidaya sesuai standar		
				Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Produksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan			Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan		
			Menguatnya Rantai Nilai Perikanan melalui Peningkatan Konsumsi, Kapasitas Kelompok Usaha, dan Ketersediaan Bahan Baku		Angka Konsumsi Ikan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
					Jumlah kelompok yang meningkat kelasnya		
					Persentase ketersediaan bahan baku untuk usaha pengolahan hasil perikanan		

				Meningkatnya sarana prasarana logistik hasil perikanan yang higienis	Jumlah Diversifikasi Produk Olahan Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
					Jumlah Kemitraan Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan		
					Jumlah Pemenuhan Legalitas Usaha Pengolahan Hasil Perikanan		
				Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Pembinaan terhadap penerapan Persyaratan Perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala usaha dan Resiko	
				Meningkatnya sarana prasarana logistik hasil perikanan yang higienis	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Logistik Hasil Perikanan yang Higienis	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
				Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

Keterangan:

Kolom 1: NSPK bisa diambil dari lampiran UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan/atau regulasi terkait urusan masing2.

Kolom 2: Tujuan Renstra

Kolom 3: Sasasaran Renstra

Kolom 4: Outcome merupakan sasaran kinerja program. Levelnya kinerjanya dibawah sasaran
Kolom 5: Output merupakan sasaran kinerja kegiatan dan Sub Kegiatan. Level kinerjanya dibawah outcome
Kolom 6: Penulisan indikator tujuan, sasaran, outcome, dan output sejajar sesuai warna
Kolom 7: Dituliskan program, kegiatan, sub kegiatan sesuai Kepmendagri 900/2024
Kolom 8: Keterangan jika diperlukan



Tabel Penyusunan Renstra Berdasarkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

7. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				8.720.400.075,00		8.858.444.008,00		8.963.327.982,00		9.070.350.118,00		9.179.012.913,00		
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.873.600.075,00		5.966.579.164,00		6.037.223.461,00		6.109.307.909,00		6.182.497.417, 00		
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	IKM Perangkat Daerah (Indeks)	92,50	93,50	5.873.600.075,00	94,50	5.966.579.164,00	95,50	6.037.223.461,00	96,50	6.109.307.909,00	97,50	6.182.497.417, 00	3.25.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PERIKANAN	
3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.206.000,00		4.272.581,00		4.323.168,00		4.374.787,00		4.427.197,00		
Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai standar regulasi	11	11	4206000	11	4727581	11	4323168	11	4374787	12	4427197		

3.25.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				416.000,00		422.585,00		427.589,00		432.694,00		437.878,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4,00	4,00	416.000,00	4,00	422.585,00	4,00	427.589,00	4,00	432.694,00	5,00	437.878,00		
3.25.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2.790.000,00		2.834.166,00		2.867.722,00		2.901.963,00		2.936.728,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2,00	2,00	2.790.000,00	2,00	2.834.166,00	2,00	2.867.722,00	2,00	2.901.963,00	2,00	2.936.728,00		
3.25.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.000.000,00		1.015.830,00		1.027.857,00		1.040.130,00		1.052.591,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5,00	5,00	1.000.000,00	5,00	1.015.830,00	5,00	1.027.857,00	5,00	1.040.130,00	5,00	1.052.591,00		
3.25.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
Administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang dijabarkan sesuai standar regulasi	12	12	5.187.290.275,00	12	5.269.405.080,00	12	5.331.794.836,00	12	5.395.456.467,00	12	5.460.094.035,00		
3.25.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.093.196.575,00		5.173.821.877,00		5.235.079.928,00		5.297.586.782,00		5.361.051.872,00		

[illegible]

Pegawai perangkat daerah terfasilitasi administrasi kepegawaian sesuai standar	Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian sesuai standar	100	100	-	100	45.000.000,00	100	45.532.800,00	100	46.076.462,00	100	46.628.457,00		
3.25.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		35.000.000,00		35.414.400,00		35.837.248,00		36.266.578,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	70	70	0,00	70	35.000.000,00	70	35.414.400,00	70	35.837.248,00	70	36.266.578,00		
3.25.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0,00		10.000.000,00		10.118.400,00		10.239.214,00		10.361.879,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	14	14	0,00	14	10.000.000,00	14	10.118.400,00	14	10.239.214,00	14	10.361.879,00		
3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	88,62	100	88.392.600,00	100	89.791.854,00	100	90.854.991,00	100	91.939.800,00	100	93.041.237,00		
3.25.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.227.100,00		5.309.845,00		5.372.714,00		5.436.864,00		5.501.997,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	5.227.100,00	12	5.309.845,00	12	5.372.714,00	12	5.436.864,00	12	5.501.997,00		

3.25.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				38.269.500,00		38.875.306,00		39.335.590,00		39.805.257,00		40.282.124,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	38.269.500,00	12	38.875.306,00	12	39.335.590,00	12	39.805.257,00	12	40.282.124,00		
3.25.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.106.000,00		4.170.998,00		4.220.383,00		4.270.774,00		4.321.938,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	4.106.000,00	12	4.170.998,00	12	4.220.383,00	12	4.270.774,00	12	4.321.938,00		
3.25.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				5.610.000,00		5.698.806,00		5.766.280,00		5.835.130,00		5.905.034,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	5.610.000,00	12	5.698.806,00	12	5.766.280,00	12	5.835.130,00	12	5.905.034,00		
3.25.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35.180.000,00		35.736.899,00		36.160.024,00		36.591.775,00		37.030.144,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	35.180.000,00	12	35.736.899,00	12	36.160.024,00	12	36.591.775,00	12	37.030.144,00		
3.25.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				518.161.200,00		457.363.692,00		462.778.878,00		468.304.457,00		473.914.745,00		
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	95,03	100	518.161.200,00	100	526363692	100	532595838	100	538955032	100	545411713		

3.25.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				251.627.500,00		186.610.763,00		188.820.235,00		191.074.748,00		193.363.824,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	251.627.500,00	12	186.610.763,00	12	188.820.235,00	12	191.074.748,00	12	193.363.824,00		
3.25.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				27.292.100,00		27.724.134,00		28.052.388,00		28.387.333,00		28.727.413,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	27.292.100,00	12	27.724.134,00	12	28.052.388,00	12	28.387.333,00	12	28.727.413,00		
3.25.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				239.241.600,00		243.028.795,00		245.906.255,00		248.842.376,00		251.823.508,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	239.241.600,00	12	243.028.795,00	12	245.906.255,00	12	248.842.376,00	12	251.823.508,00		
3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				75.550.000,00		100.745.957,00		101.938.788,00		103.155.937,00		104.391.746,00		
Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Barang milik daerah yang terpelihara	85,54	100	75.550.000,00	100	76745957	100	77654629	100	78581825	100	79523235		

3.25.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				75.550.000,00		76.745.957,00		77.654.629,00		78.581.825,00		79.523.235,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	53	53	75.550.000,00	53	76.745.957,00	53	77.654.629,00	53	78.581.825,00	53	79.523.235,00		
3.25.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		24.000.000,00		24.284.159,00		24.574.112,00		24.868.511,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1	0,00	1	24.000.000,00	1	24.284.159,00	1	24.574.112,00	1	24.868.511,00		
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP														
Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Tangkap melalui Peningkatan Produktivitas Nelayan dan Pengelolaan Perairan Darat	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	9.191,08	10.456,08	285.000.000,00	10.615,52	289.511.550,00	11.137,81	292.939.365,00	11.685,79	296.437.062,00	12.260,73	299.988.378,00	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN	
	Produksi Perikanan Tangkap (%)	81,67	100		100		100		100		100			
	Persentase produktifitas nelayan tangkap (%)	-27,87	5,74		6,10		6,45		6,81		7,19			

[illegible]

[illegible]

Meningkatnya Produktivitas dan Efisiensi Usaha Perikanan Budidaya melalui Ketersediaan Pakan, Pemanfaatan Benih Berkualitas, dan Pengendalian Kematian Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	49,221	58.522,12	2.126.600.000,00	57.780,90	2.160.264.078,00	60.953,07	2.185.841.604,00	64.299,40	2.211.940.552,00	67.829,43	2.238.439.601,00	3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	
	Produksi Perikanan Budidaya (%)	117,12	100		100		100		100		100			
	Persentase Pembudidaya Ikan Yang Tercukupi Kebutuhan Pakannya (%)	90,34	91,27		91,84		92,41		92,98		93,52			
	Persentase Pembudidaya Ikan yang memanfaatkan Benih Ikan berkualitas (%)	4,15	4,58		4,80		5,04		5,30		5,56			
	Persentase Kematian Ikan (%)	10,00	9,00		8,50		8,00		7,50		7,00			
3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil														
*Meningkatnya ketersediaan bahan baku pakan ikan mandiri *	Persentase ketersediaan bahan baku pakan ikan mandiri	10	20	100000000	22	101583000	24	102785743	26	104.013.004,00	28	105.259.080,00		
	Jumlah kemitraan pakan ikan	2	6		8		10		12		14			
	Jumlah pembenih ikan yang bersertifikat	2	6		8		10		12		14			

3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				100.000.000,00		101.583.000,00		102.785.743,00		104.013.004,00		105.259.080,00		
Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	4,00	6,00	100.000.000,00	8,00	101.583.000,00	10,00	102.785.743,00	12,00	104.013.004,00	14,00	105.259.080,00		
3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				2.026.600.000,00		2.058.681.078,00		2.083.055.861,00		2.107.927.548,00		2.133.180.521,00		
"Meningkatnya Kualitas Sarana Produksi Benih Ikan "	Jumlah sarana produksi benih berkualitas	2	4	150000000	5	152374500	6	154178614	7	156019506,73	8	157888620		
	jumlah kasus penyakit ikan	16	14		13		12		11		10			
	persentase pembudidaya ikan yang menerapkan lingkungan budidaya sesuai standar	10	14		16		18		20		22			
3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000,00		101.583.000,00		102.785.743,00		104.013.004,00		105.259.080,00		

Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	83,00	87,00	100.000.000,00	89,00	101.583.000,00	91,00	102.785.743,00	93,00	104.013.004,00	95,00	105.259.080,00		
3.25.04.2.04.0004 - Pengelolaa Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.791.500,00		51.392.871,00		52.006.502,00		52.629.540,00		
Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	12	12	50.000.000,00	12	50.791.500,00	12	51.392.871,00	12	52.006.502,00	12	52.629.540,00		
3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1.876.600.000,00		1.906.306.578,00		1.928.877.247,00		1.951.908.042,00		1.975.291.901,00		
Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	37,00	30,00	1.876.600.000,00	35,00	1.906.306.578,00	40,00	1.928.877.247,00	45,00	1.951.908.042,00	50,00	1.975.291.901,00		
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN														
Menguatnya Rantai Nilai Perikanan melalui Peningkatan Konsumsi, Kapasitas Kelompok Usaha, dan Ketersediaan Bahan Baku	Prosentase ketersediaan bahan baku untuk usaha pengolahan hasil perikanan (%)	88,90	90,46	435.200.000,00	90,69	442.089.216,00	91,59	447.323.552,00	92,51	452.664.595,00	93,43	458.087.517,00	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN	

	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	40,03	25,05		26,02		27,38		28,81		30,32			
	Jumlah Kelompok yang Meningkat kelasnya (Kelompok)	1,00	3,00		4,00		5,00		6,00		7,00			
3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil														
Meningkatnya sarana prasarana logistik hasil perikanan yang higienis	jumlah diversifikasi produk olahan hasil perikanan	4	8	50000000	10	50.791.500,00	12	51.392.871,00	14	52.006.502,00	16	52.629.540,00		
	jumlah kemitraan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan	1	3		4		5		6		7			
	jumlah pemenuhan legalitas usaha pengolahan hasil perikanan	4	6		7		8		9		10			
3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				50.000.000,00		50.791.500,00		51.392.871,00		52.006.502,00		52.629.540,00		

Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	5,00	12,00	50.000.000,00	14,00	50.791.500,00	16,00	51.392.871,00	18,00	52.006.502,00	20,00	52.629.540,00		
3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota														
Meningkatnya sarana prasarana logistik hasil perikanan yang higienis	Persentase peningkatan sarana prasarana logistik hasil perikanan yang higienis	14	11	385.200.000,00	12	391.297.716,00	13	395.930.681,00	14	400.658.093,00	15	405.457.977,00		
3.25.06.2.03.0001 - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				250.000.000,00		253.957.500,00		256.964.357,00		260.032.511,00		263.147.701,00		
Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	593,70	670,23	250.000.000,00	691,79	253.957.500,00	727,96	256.964.357,00	766,03	260.032.511,00	805,94	263.147.701,00		

POHON KINERJA TAHUN 2025-2030



DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR BIDANG BUDIDAYA

No.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
1	Jumlah produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan dari hasil budidaya ikan konsumsi baik air tawar, payau maupun laut pada tahun N dalam satuan Ton
2	Produksi Perikanan Budidaya	Merupakan perbandingan antara jumlah produksi budidaya ikan konsumsi pada tahun N dengan target produksi ikan konsumsi pada tahun N dikalikan 100%
3	Persentase Pembudidaya Ikan Yang Tercukupi Kebutuhan Pakannya	Jumlah pembudidaya ikan pada tahun N dikurangi jumlah pembudidaya ikan yang mengajukan bantuan pakan ikan pada tahun N, di bagi jumlah pembudidaya ikan pada tahun N dikalikan 100%
4	Persentase Pembudidaya Ikan yang memanfaatkan Benih ikan berkualitas	Jumlah pembudidaya ikan pada tahun N dikurangi jumlah pembudidaya ikan yang memanfaatkan benih ikan berkualitas (dari UPR yang memenuhi standart Pembenihan Ikan) kali 100%
5	Persentase kematian ikan	Perbandingan jumlah kematian ikan pada interval tertentu pada tahun N dengan jumlah benih ikan yang ditebar pada interval tertentu di tahun N dikalikan 100%
6	Persentase ketersediaan bahan baku pakan ikan mandiri	Perbandingan jumlah pakan ikan mandiri yang digunakan untuk budidaya pada tahun N dengan seluruh jumlah pakan yang digunakan untuk produksi pada tahun N dikalikan 100%
7	Jumlah kemitraan pakan ikan	Jumlah kemitraan pakan ikan antara produsen pakan ikan dan pembudidaya ikan pada sampai dengan tahun N (komulatif)
8	Jumlah Pembenih Ikan Yang Bersertifikat	Jumlah pembenih ikan yang memiliki sertifikat pembenihan ikan pada tahun N (komulatif)
9	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang mendapatkan pendampingan, pembinaan, pelatihan pada tahun N
10	Jumlah sarana produksi benih ikan berkualitas	Jumlah sarana produksi benih ikan yang berkualitas pada tahun N
11	Jumlah Kasus Penyakit Ikan	Jumlah laporan kasus serangan penyakit ikan pada Tahun N
12	Persentase pembudidaya ikan yang menerapkan lingkungan budidaya sesuai standar	Perbandingan jumlah pembudidaya ikan yang menerapkan lingkungan budidaya sesuai standart (pada tahun N dengan total jumlah pembudidaya ikan budidaya mendapatkan pendampingan dan sosialisasi pada tahun N dikalikan 100%
13	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana produksi benih balai benih ikan yang dapat dimanfaatkan pada Tahun N di UPTPBAT

14	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bantuan hibah sarana pembudidayaan ikan ke kelompok pembudidaya ikan pada tahun N
----	---	---

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR TANGKAP

No.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
1	Jumlah produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap baik tangkap laut maupun tangkap Perairan Umum Daratan (PUD) pada tahun N dalam satuan Ton
2	Produksi Perikanan Tangkap	Merupakan perbandingan antara realisasi produksi perikanan tangkap (laut dan PUD) dengan target produksi perikanan tangkap (laut dan PUD) pada tahun N dikalikan 100% Realisasi produksi perikanan tangkap Target produksi perikanan tangkap $\times 100\%$
3	Persentase PUD yang dikelola oleh kelompok	Merupakan perbandingan antara PUD yang dikelola oleh kelompok pada tahun N dengan total PUD yang ada di Kab. Tulungagung Persentase PUD yg dikelola oleh kelompok = $\frac{\text{PUD terkelola oleh KUB atau pokmaswas}}{\text{Total PUD Kab. Tulungagung}} \times 100\%$
4	Persentase Produktivitas nelayan tangkap	Persentase peningkatan produktivitas nelayan pada tahun N dibandingkan dengan tahun (N-1) yang dapat diketahui dari perbandingan jumlah hasil tangkapan dengan usaha penangkapan yang dilakukan nelayan, dalam hal ini usaha penangkapan yang digunakan adalah jumlah trip penangkapan Produktivitas = $\frac{\text{Hasil Tangkapan}}{\text{Trip}} \times 100\%$ Persentase produktivitas nelayan tangkap = $\frac{\text{Produktivitas tahun N} - \text{Produktivitas tahun (N - 1)}}{\text{Produktivitas tahun (N - 1)}} \times 100\%$
5	Persentase peningkatan restocking Sumber Daya Ikan (SDI)	Persentase peningkatan jumlah benih restocking yang dilaksanakan pada tahun N dibandingkan dengan tahun (N-1) Persentase peningkatan restocking SDI = $\frac{\text{Jumlah benih restocking tahun N} - \text{Jumlah benih restocking tahun (N - 1)}}{\text{Jumlah benih restocking tahun (N - 1)}} \times 100\%$

No.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
6	Penurunan jumlah kasus pelanggaran pengelolaan Sumber Daya Ikan	Penurunan jumlah kasus pelanggaran pengelolaan SDI yang terjadi (diisi jumlah kasus yang terjadi pada tahun N)
7	Jumlah kelompok nelayan yang terlatih	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan akses pemberdayaan, sosialisasi, pelatihan pada tahun N
8	Persentase peningkatan perijinan yang dimiliki nelayan	Persentase peningkatan dokumen perijinan yang dimiliki oleh nelayan pada tahun N dibandingkan dengan tahun (N-1) $\text{Persentase peningkatan perijinan} = \frac{\text{Jumlah dokumen perijinan tahun N} - \text{Jumlah dokumen perijinan tahun (N - 1)}}{\text{Jumlah dokumen perijinan tahun (N - 1)}} \times 100\%$
9	Persentase peningkatan sarana tangkap nelayan	Persentase peningkatan sarana tangkap nelayan pada tahun N dibandingkan dengan tahun (N-1) $\text{Persentase peningkatan sarana tangkap} = \frac{\text{Jumlah sarana tangkap tahun N} - \text{Jumlah sarana tangkap tahun (N - 1)}}{\text{Jumlah sarana tangkap tahun (N - 1)}} \times 100\%$
10	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Jumlah bantuan prasarana perikanan tangkap PUD pada tahun N
11	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Jumlah paket bantuan sarana perikanan tangkap PUD pada tahun N

No.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
12	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah nelayan yang telah mendapatkan fasilitasi perijinan, pelatihan, sosialisasi, dll pada tahun N

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR BIDANG P2HP

No.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
1	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	Jumlah produksi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan termasuk pengasapan ikan, pemindangan ikan, penanganan produk segar, dan pengolahan lainnya pada tahun N dalam satuan ton
2	Angka Konsumsi Ikan	Jumlah konsumsi ikan perkapita pertahun dihitung dalam satuan kilogram
3	Jumlah kelompok yang meningkat kelasnya	Jumlah kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan yang meningkat kelasnya pada tahun N (komulatif)
4	Persentase ketersediaan bahan baku untuk usaha pengolahan hasil perikanan	Merupakan perbandingan antara jumlah produksi perikanan dikurangi ikan keluar dengan kebutuhan bahan baku olahan pada tahun N dikalikan 100%
5	Jumlah Diversifikasi Produk Olahan Hasil Perikanan	Jumlah inovasi produk olahan hasil perikanan pada tahun N (komulatif)
6	Jumlah Kemitraan Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah mitra pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan pada tahun N (komulatif)
7	Jumlah Pemenuhan Legalitas Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah terbitnya rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan bagi Unit Pengolahan Ikan
8	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Logistik Hasil Perikanan yang Higienis	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Logistik Hasil Perikanan yang Higienis pada tahun N dibandingkan dengan tahun (N-1)
9	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Pengolahan Ikan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko pada tahun N
10	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi pelatihan/bimbingan teknis/fasilitasi dalam rangka pengembangan kelas kelompok pada tahun N
11	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk industri pengolahan hasil perikanan pada tahun N

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN											
- Meningkatnya nilai tambah perekonomian daerah berbasis potensi lokal	Meningkatnya Produksi Usaha Sektor Perikanan		Rata-rata Persentase peningkatan Produksi Usaha Sektor Perikanan (%)	22,30	7,18	7,56	7,95	8,36	8,80	9,27	
		Meningkatnya Produksi Usaha Perikanan Tangkap	Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Usaha Perikanan Tangkap (%)	52,28	6,50	6,82	7,16	7,51	7,88	8,26	
		Meningkatnya Produksi Usaha Perikanan Budidaya	Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Usaha Perikanan Budidaya (%)	8,61	8,80	9,28	9,77	10,30	10,87	11,47	
		Meningkatnya Produksi Usaha Olahan Hasil Perikanan	Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (%)	6,02	6,25	6,58	6,92	7,28	7,66	8,06	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	84,05	82,06	82,25	82,50	82,75	83,00	83,25	

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					8.720.400.075,00		8.858.444.008,00		8.983.327.882,00		9.070.350.118,00		9.179.012.813,00	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.873.600.075,00		5.966.578.164,00		6.037.223.461,00		6.108.307.909,00		6.182.487.417,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	IKM Perangkat Daerah (Indeks)	92,50	92,50	93,50	5.873.600.075,00	94,50	5.966.578.164,00	95,50	6.037.223.461,00	96,50	6.108.307.909,00	97,50	6.182.487.417,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					285.000.000,00		289.511.550,00		292.839.365,00		296.437.062,00		299.988.378,00	
Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Tangkap melalui Peningkatan Produktivitas Nelayan dan Pengelolaan Peralatan Darat	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	9.191,08	9.788,50	10.458,08	285.000.000,00	10.615,52	289.511.550,00	11.137,81	292.839.365,00	11.685,79	296.437.062,00	12.260,73	299.988.378,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Produksi Perikanan Tangkap (%)	81,67	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan		
	Persentase produktivitas nelayan tangkap (%)	-27,87	3,80	5,74		6,10		6,45		6,81		7,19		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Persentase PUD yang dikelola oleh Kelompok (%)	75,00	77,50	80,00		82,50		85,00		87,50		90,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					2.126.600.000,00		2.160.264.078,00		2.185.841.604,00		2.211.940.552,00		2.236.439.601,00	
Meningkatnya Produktivitas dan Efisiensi Usaha Perikanan Budidaya melalui Ketersediaan Pakan, Pemanfaatan Benih Berkualitas, dan Pengendalian Kematian Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	46.221	53.552,45	58.522,12	2.126.600.000,00	57.780,90	2.160.264.078,00	60.653,07	2.185.841.604,00	64.286,40	2.211.940.552,00	67.828,43	2.236.439.601,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Persentase Kematian Ikan (%)	10,00	9,50	9,00		8,50		8,00		7,50		7,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Persentase Pembudidaya Ikan yang memanfaatkan Benih Ikan berkualitas (%)	4,15	4,36	4,58		4,80		5,04		5,30		5,56		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Persentase Pembudidaya Ikan Yang Tercukupi Kebutuhan Pakannya (%)	90,34	90,92	91,27		91,84		92,41		92,98		93,52		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Produksi Perikanan Budidaya (%)	117,12	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					435.200.000,00		442.089.216,00		447.323.552,00		452.664.595,00		458.087.517,00	
Menguatnya Rantai Nilai Perikanan melalui Peningkatan Konsumsi, Kapasitas Kelompok Usaha, dan Ketersediaan Bahan Baku	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	40,03	23,50	25,05	435.200.000,00	26,02	442.089.216,00	27,38	447.323.552,00	28,81	452.664.595,00	30,32	458.087.517,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Jumlah Kelompok yang Meningkatkan keisanya (Kelompok)	1,00	2,00	3,00		4,00		5,00		6,00		7,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Prosentase ketersediaan bahan baku untuk usaha pengolahan hasil perikanan (%)	88,60	88,78	90,46		90,68		91,58		92,51		93,43		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
TOTAL KESELURUHAN					8720400075.00		8858444008.00		8963327882.00		9070350118.00		9179012913.00	

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN							
- Meningkatnya nilai tambah perekonomian daerah berbasis potensi lokal	Meningkatnya Produksi Usaha Sektor Perikanan	Meningkatnya Produksi Usaha Perikanan Tangkap	Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Tangkap melalui Peningkatan Produktivitas Nelayan dan Pengelolaan Perairan Darat		Rata-rata Persentase peningkatan Produksi Usaha Sektor Perikanan (%)		
					Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Usaha Perikanan Tangkap (%)		
					Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
					Produksi Perikanan Tangkap (%)	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
				Meningkatnya Sumber Daya Ikan (SDI)	Persentase produktifitas nelayan tangkap (%)	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
					Persentase PUD yang dikelola oleh Kelompok (%)	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
					Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	3.25.03.2.01.0002 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	
					Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	3.25.03.2.01.0004 - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
				Meningkatnya kompetensi kelompok nelayan	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
				Jumlah Ikan yang dilelang	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan)	3.25.03.2.03 - Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
					Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan)	3.25.03.2.03.0002 - Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
		Meningkatnya Produksi Usaha Perikanan Budidaya			Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Usaha Perikanan Budidaya (%)		
		Meningkatnya Produktivitas dan Efisiensi Usaha Perikanan Budidaya melalui Ketersediaan Pakan, Pemanfaatan Benih Berkualitas, dan Pengendalian Kematian Ikan			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
					Persentase Kematian Ikan (%)	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
					Persentase Pembudidaya Ikan yang memanfaatkan Benih ikan berkualitas (%)	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
					Persentase Pembudidaya Ikan Yang Tercukupi Kebutuhan Pakannya (%)	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
					Produksi Perikanan Budidaya (%)	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
				"Meningkatnya ketersediaan bahan baku pakan ikan mandiri"	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
				"Meningkatnya Kualitas Sarana Produksi Benih Ikan "	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	
					Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		
					Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		
					Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
					Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	3.25.04.2.04.0004 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
					Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
		Meningkatnya Produksi Usaha Olahan Hasil Perikanan		Menguatnya Rantai Nilai Perikanan melalui Peningkatan Konsumsi, Kapasitas Kelompok Usaha, dan Ketersediaan Bahan Baku		Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (%)		
						Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
						Jumlah Kelompok yang Meningkatkan kelasnya (Kelompok)	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
					Prosentase ketersediaan bahan baku untuk usaha pengolahan hasil perikanan (%)	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		
					Meningkatnya sarana prasarana logistik hasil perikanan yang higienis	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	
				Meningkatnya sarana prasarana logistik hasil perikanan yang higienis	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	3.25.06.2.03.0001 - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)		
			Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah		IKM Perangkat Daerah (Indeks)	3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai standar regulasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.25.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3.25.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.25.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang dijalankan sesuai standar regulasi	3.25.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.25.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	3.25.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3.25.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.25.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.25.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.25.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3.25.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	3.25.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
				Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawain sesuai standar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.25.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.25.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.25.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.25.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3.25.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.25.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.25.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.25.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.25.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.25.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.25.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.25.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.25.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.25.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN				
1.	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Produktivitas dan Efisiensi Usaha Perikanan Budidaya melalui Ketersediaan Pakan, Pemanfaatan Benih Berkualitas, dan Pengendalian Kematian Ikan	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
			3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
			3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
			3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			3.25.04.2.04.0004 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Serana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN									
2.	Rata-rata Persentase peningkatan Produksi Usaha Sektor Perikanan	%	22,30	7,18	7,56	7,95	8,36	8,80	9,27	
3.	Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Usaha Perikanan Tangkap	%	52,26	6,50	6,82	7,16	7,51	7,88	8,26	
4.	Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Usaha Perikanan Budidaya	%	8,61	8,80	9,28	9,77	10,30	10,87	11,47	
5.	Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	%	6,02	6,25	6,58	6,92	7,28	7,66	8,06	
6.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	84,05	82,06	82,25	82,50	82,75	83,00	83,25	

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
2.	Produksi Perikanan Tangkap	positif	%	81,67	100	100	100	100	100	100	
3.	Produksi Perikanan Budidaya	positif	%	117,12	100	100	100	100	100	100	